

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi pola hubungan desentralistik. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah Sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah dalam mengelola dan mengurus seluruh aspek pemerintahan daerah baik dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Ciri yang utama dari suatu daerah yang mampu atau bisa melaksanakan otonomi, yaitu dalam kemampuan keuangan daerah yang berarti daerah harus mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk mengelola, menelusuri sumber-sumber keuangan, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk penyelenggaraan pemerintahnya. Pemerintah daerah dihimbau untuk meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada tanpa melanggar norma (Halim.Abdul, 2001)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah dari sumber-sumber yang berada di dalam wilayah tersebut. Pendapatan ini diperoleh melalui pengenaan pajak, retribusi, dan sumber-sumber

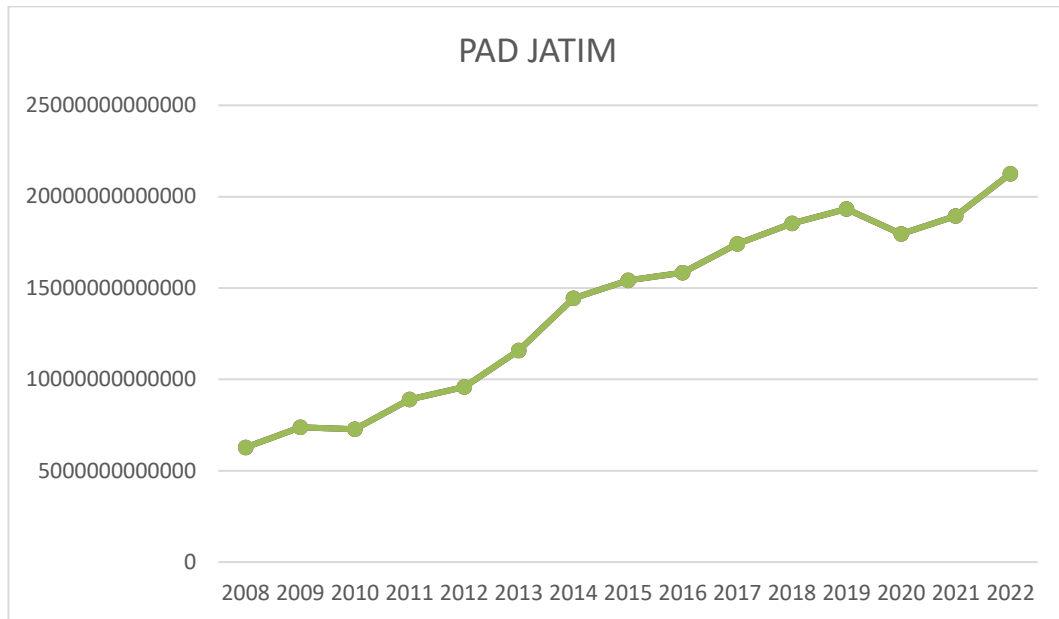
lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah, wilayah tersebut dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Penting untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat menanggung sebagian besar belanja yang dibutuhkan untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, wilayah tersebut dapat mewujudkan kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah yang luas, tanggung jawab, dan nyata. (Rori Chindy Febry dkk., 2016) .

Menurut (Supriady, 2003), Pendapatan Asli Daerah , yang berasal dari pajak dan retribusi yang dikenakan oleh daerah, diharapkan akan berperan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan wilayah, dengan tujuan meningkatkan serta meratakan taraf kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, bisa diungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang signifikan dalam aspek keuangan daerah dan menjadi indikator utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang konkret, dinamis, serta bertanggung jawab. (Ardiani Evi & Handayani Sri Indah, 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 22 tentang Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam ruang lingkup daerah itu sendiri dan dihimpun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (*MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, t.t.*) .

Gambar 1. 1 Grafik PAD Provinsi Jawa Timur 2008 - 2022



Sumber: DJPK data diolah

Pada di atas table di atas ditemukan bahwa selama tahun 2008-2022, PAD mengalami kenaikan dan penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan pada tahun 2012-2017. Lalu mengalami penurunan di tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa beberapa sektor perekonomian harus terhambat operasionalnya, bahkan tidak lagi dapat beroperasi. Peningkatan PAD segera terjadi setelah terpukul karena pandemi di tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya kebijakan *new normal* dimana aktivitas ekonomi sudah mulai dapat beroperasi secara bertahap. Data tersebut diperoleh dari (Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Jawa Timur (Rupiah), 2023)

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi sebuah wilayah dipercaya masih merupakan

indikator yang penting dalam merencanakan arah pembangunan yang divisualkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan hanya oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut namun oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut (Sukirno, 2003).

PAD dengan PDRB memiliki hubungan secara fungsional. Dengan memajukan PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program - program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya (firdhaaksari,+9.Batik, t.t.) .

Hubungan PDRB terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan oleh adanya dampak aktifitas perekonomian dalam sektor ekonomi di daerah. Jika aktifitas ekonomipada sektor itu terjadi kenaikan, berpengaruh terhadap besaran PAD daerah, karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung, menyimpulkan setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD didalam pemerintah daerah (Murib dkk., t.t.).

Salah satu taktik dalam mengukur kemajuan ekonomi adalah melalui observasi terhadap pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Evaluasi pertumbuhan ekonomi dijalankan dengan mengacu pada nilai PDRB yang dihitung

dengan menggunakan harga konstan, karena pendekatan ini tidak terdampak oleh perubahan harga. Oleh karena itu, perubahan yang tercatat dalam nilai PDRB adalah perubahan yang murni dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. (Rosmalia & Iskandar, t.t.) .

Naiknya pendapatan per individu akan beriringan dengan kenaikan kapasitasnya dalam membayar berbagai jenis pungutan yang diatur oleh pemerintah . Dalam perspektif ekonomi yang lebih luas, dapat digambarkan bahwa semakin besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam PDRB, ini mencerminkan upaya untuk merangsang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (Saragih, 2003).

Jumlah Penduduk memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks suatu negara. Para ekonom klasik, yang dipimpin oleh Adam Smith, bahkan menilai bahwa jumlah Penduduk adalah input potensial yang dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan output di rumah tangga maupun perusahaan. Semakin besar jumlah Penduduk, semakin banyak tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, karena pertambahan jumlah Penduduk terus berlanjut, banyak langkah yang harus diambil untuk mengatasi pertumbuhan populasi yang terus meningkat. (Makdalena F Asmuruf dkk., 2015).

Penghasilan wilayah dapat dihasilkan melalui kontribusi masyarakat dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, dan faktor-faktor lainnya. Dengan hadirnya penduduk, efek positifnya terlihat dalam

mendorong aktivitas ekonomi di daerah tersebut dan merangsang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. (Murib dkk., t.t.) .

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi dupuluh sembilan (29) kabupaten dan sembilan (9) kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten atau kota yang paling banyak di Indonesia (*Provinsi Jawa Timur, t.t.*).

Sebagian besar warga di Jawa Timur adalah anggota Suku Jawa, namun realitas di wilayah tersebut lebih kompleks. Suku Jawa tersebar di hampir semua bagian daratan Jawa Timur. Mayoritas dari mereka mengamalkan agama Islam, meskipun ada sebagian yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha (*Provinsi Jawa Timur, t.t.*) .

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2008-2022 . Meningkatnya jumlah penduduk ini adalah akibat dari adanya kelahiran dan pekerja atau imigran yang datang ke Provinsi Jawa Timur untuk menetap sebagai penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini akan menyebabkan semakin banyaknya pula konsumen dari barang dan jasa yang menyebabkan perkembangan usaha sehingga akan dibayarkan pula pajak yang lebih besar, hal ini memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak 3 daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan peraturan pajak dan retribusi daerah lebih limitatif.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Peranan Pajak dalam perekonomian suatu negara sangatlah besar, salah satunya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menerangkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan 40 Juta Jiwa yang tersebar di 29 Kabupaten dan 9 kota dengan diatas 50% merupakan penduduk usia produktif (Badan Pusat Statistik, 2020) membuat potensi perekonomian daerah meningkat. Tingginya jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak suatu daerah.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pajak Daerah, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur ”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

1. Penelitian ini mencakup data *time series* atau runtut waktu periode tahun 2008-2022 pada Provinsi Jawa Timur.
2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel independen berupa, PDRB, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi studi empiris yang menambah ilmu pengetahuan.